

KENDALA PEMERINTAH NAGARI ALANG RAMBAH TAPAN DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA BANJIR

Sintya Khairun Nisak^{1(a)}, Zikri Alhadi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}khairunnisaksintya2001@gmail.com, ^{b)}zikrialhadi@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

13-07-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

Kata Kunci:

Pemerintah Nagari, Bencana Banjir, Kendala Mitigasi

Keywords:

Nagari Government, Flood Disaster, Mitigation Constraints

Corresponding Author:

zikrialhadi@fis.unp.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.214>

PENDAHULUAN

Nagari Alang Rambah Tapan adalah salah satu dari 10 nagari di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, yang berasal dari Kecamatan Pancung Soal dan memiliki luas 44,95 km²,

ABSTRAK

Bencana alam banjir yang sering terjadi di Nagari Alang Rambah Tapan sejak tahun 2020 hingga 2024 telah menyebabkan kerugian besar, terutama pada lahan perkebunan, fasilitas umum, prasarana, peternakan, dan permukiman warga. Pada tahun 2023, dampak banjir mencapai puncaknya dengan kerugian yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Alang Rambah Tapan dalam menangani bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan informan dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya mitigasi bencana banjir, baik kendala internal maupun eksternal. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran atau dana, kurangnya kewenangan pemerintah nagari dalam mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mitigasi bencana, serta keterbatasan dalam menyiapkan alat-alat mitigasi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kebencanaan, serta tidak memadainya sarana dan prasarana atau peralatan kebencanaan, turut menjadi hambatan signifikan dalam upaya mitigasi yang dilakukan.

ABSTRACT

Frequent floods in Nagari Alang Rambah Tapan from 2020 to 2024 have caused significant losses, especially to plantation land, public facilities, infrastructure, livestock, and residential areas. In 2023, the impact of flooding reached its peak with significant losses. This research aims to explain the difficulties faced by the Government of Nagari Alang Rambah Tapan in dealing with flood disasters. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, and informants were selected through a purposive sampling technique. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results showed various obstacles faced in flood disaster mitigation efforts, both internal and external. These constraints include limited budget or funds, the need for more authority from the village government in directing the use of Village Funds for disaster mitigation, and limitations in preparing mitigation tools. In addition, the lack of professional human resources in the disaster field, as well as inadequate facilities and infrastructure or disaster equipment, also became significant obstacles in the mitigation efforts carried out.

atau 14,94 persen dari wilayah Kecamatan Basa Ampek Ba lai Tapan. Nagari Alang Rambah Tapan adalah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ini berfungsi sebagai jalan

lintas antara Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu atau sebaliknya (Nagari Tapan,2016).

Bencana yang masih sering terjadi di nagari Alang Rambah Tapan adalah banjir, dikarenakan hujan yang terjadi dengan intensitas tinggi dan dalam kurun waktu yang lama membuat debit air meningkat di hulu sungai sehingga menyebar ke pemukiman warga. Sehingga menyebabkan tidak tentramnya kehidupan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di nagari Alang Rambah Tapan. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya mitigasi bencana banjir agar dapat mengurangi dampak yang akan ditimbulkan jika sewaktu-waktu bencana banjir melanda serta tetap dapat menjaga ketentraman Nagari Alang Rambah Tapan.

Menurut Bakornas (2007), faktor utama yang dapat menyebabkan bencana sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya, sikap atau perilaku yang mengakibatkan menurunnya sumber daya alam, kurangnya informasi peringatan dini yang mengakibatkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dan ketidaksiapan menghadapi bencana. Tabel 1 menunjukkan data kerugian bencana banjir tahun 2023, berdasarkan penjelasan sebelumnya:

Tabel 1. Menunjukkan Data Kerugian yang Disebabkan oleh Bencana Banjir pada Tahun 2023

No	Jenis Kerugian	Kerugian Total
1	Pemukiman Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rumah terendam banjir = 60 Unit ➤ Jumlah KK = 88 KK ➤ Jiwa = 350 Jiwa ➤ Motor Rusak = 10 Unit 	Rp. 350.000.000.-
2	Lahan Perkebunan/Peternakan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkebunan sawit = 130 Ha ➤ Perkebunan jagung = 10 Ha ➤ Peternakan <ul style="list-style-type: none"> a. Ayam mati = 6000 Ekor b. Sapi mati = 1 Ekor c. Kambing mati = 2 Ekor 	Rp. 400.000.000.-
3	Infrastruktur dan Fasilitas Umum: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masjid = 1 Unit ➤ Jembatan = 1 Unit ➤ Lapangan hijau = 1 ➤ Sampan Pengangkut kelapa sawit = 2 Unit 	Rp. 700.000.000.-

No	Jenis Kerugian	Kerugian Total
	Total	Rp. 1.450.000.000.-

Sumber: Pemerintah Wali Nagari Alang Rambah Tapan (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1 maka dapat dilihat besarnya kerugian yang diakibatkan serta dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir di nagari Alang Rambah Tapan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) huruf (g) kepala desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Dengan kehadiran Pemerintah Nagari Alang Rambah Tapan ini dapat mengatasi bencana banjir yang hampir setiap tahun terjadi banjir berulang kali. Dengan membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana seperti mitigasi struktural untuk pembangunan pengendalian banjir, serta pembuatan kawat brojong disepanjang aliran sungai batang Tapan yang terletak di nagari Alang Rambah Tapan. Sehingga membuat masyarakat menjadi aman,nyaman, tentram di lingkungan bermasyarakat yang selalu dihantui dengan bencana banjir setiap saat ketika hujan lebat. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah nagarilah yang berperan atau bertanggung jawab di nagari Alang Rambah Tapan ketika terjadi bencana banjir. maka dari itu, peran pemerintah nagari tidak terlepas dari kendala maupun hambatan dalam melaksanakan mitigasi bencana banjir.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintahan Nagari Alang Rambah Tapan dalam mitigasi bencana banjir yaitu : pemerintahan nagari tidak berwenang mengatur penggunaan dana desa untuk upaya mitigasi bencana banjir atau pembuatan peralatan mitigasi bencana banjir. selanjutnya, Pemerintahan nagari mempunyai sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pendanaan dari nagari, infrastruktur dan fasilitas, belum ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dibidang kebencanaan, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan inisiatif mitigasi bencana dan banyak tanah runtuh terkikis oleh aliran air, yang mengikis pohon sawit di tepi sungai bahkan mengikis jalan raya dan jembatan antar provinsi. Akibatnya, dana yang diperlukan untuk membangun kawat brojong sangat besar.

Dengan berfokus pada permasalahan diatas, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis dan penjelasan menyeluruh mengenai kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Alang

Rambah Tapan dalam mengurangi bencana banjir. “Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari dalam mitigasi bencana banjir di Nagari Alang Rambah Tapan?” adalah rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti.

METODE PENELITIAN

Daerah yang paling sering mengalami banjir di Tapan adalah Alang Rambah Tapan. Banjir pasti terjadi jika terjadi hujan lebat dalam jangka waktu lama. Meskipun sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan, dampak buruk banjir terhadap masyarakat belum berkurang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menguraikan secara utuh tantangan yang dihadapi pemerintah Nagari Alang Rambah Tapan dalam mengurangi dampak bencana banjir. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut di atas (Sugiyono, 2012:9). Lokasi penelitian berada di nagari Alang Rambah Tapan, yang berada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Purposive sampling merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memilih informan penelitian ini karena informan mempunyai pengalaman yang relevan dalam menangani bencana banjir di Nagari Alang Rambah Tapan. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Pakar Bencana, Wali Nagari Alang Rambah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Bamus Nagari Alang Rambah Tapan dan Masyarakat Nagari Alang Rambah yang terkena dampak bencana banjir. Selanjutnya, observasi, analisis dokumen (publikasi/temuan penelitian, dan buku terkait) dan wawancara dengan informan tersebut di atas digunakan untuk mengumpulkan data (Creswell, 2013). Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memverifikasi keaslian data setelah dikumpulkan. Hasil analisis yang telah diringkas dan disajikan dalam makalah ini dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Barat memang rawan terjadinya bencana alam, salah satunya banjir yang sering terjadi di Nagari Alang Rambah, Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu nagari yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sepengetahuan penulis adalah Nagari Alang

Rambah Tapan. Empat sungai besar mengalir melalui wilayah ini, Sungai Batang Tapan adalah salah satunya. Oleh karena itu, Nagari Alang Rambah Tapan diketahui rentan terhadap bencana alam banjir. Yohana, Griandini, dan Muzambeq (2017) menyatakan bahwa banjir adalah keadaan negatif yang timbul akibat suatu kejadian terjadinya penimbunan air. Dalam hal ini, curah hujan yang tinggi di bagian hulu menyebabkan keluaran air sungai meningkat dan menjadi lebih deras. Akibatnya sungai meluap hingga ke pemukiman masyarakat Alang Rambah sehingga menimbulkan bencana banjir di Nagari Alang Rambah Tapan.

Jika upaya pencegahan seperti mitigasi bencana, dilaksanakan secara tepat dan akurat, maka frekuensi bencana banjir akan berkurang. Kita dapat mengurangi risiko dan kerusakan yang diakibatkan oleh banjir selain menghindari terjadinya bencana banjir dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi bencana. Mitigasi bencana diperlukan baik di lokasi-lokasi yang berisiko rendah dan menengah serta di wilayah-wilayah yang tingkat kerentanan bencananya relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena lokasi-lokasi yang rentan terhadap bencana akan terkena dampak dari tindakan mitigasi bencana.

Mitigasi menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, didefinisikan sebagai tindakan yang terdiri dari berbagai upaya untuk mengurangi kemungkinan bencana terjadi.

Dalam hal ini, pemerintah nagari Alang Rambah Tapan lah yang memiliki tanggung jawab dalam upaya mitigasi bencana banjir di tingkat nagari. Untuk itu Pemerintah nagari Alang Rambah Tapan memiliki peran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko bencana terutama banjir. Namun dalam menjalankan perannya, Pemerintah nagari Alang Rambah Tapan menghadapi tantangan yang mencakup masalah internal dan faktor-faktor eksternal.

Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang timbul dari dalam organisasi itu sendiri. Didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya untuk mitigasi bencana banjir di nagari Alang Rambah Tapan, terdapat kendala internal yang dihadapi oleh Pemerintah nagari Alang Rambah Tapan yaitu salah satunya tantangan utama dalam mitigasi

bencana banjir di Nagari Alang Rambah adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kebencanaan, Pemerintah nagari tidak mempunyai wewenang untuk menyiapkan alat mitigasi bencana dan menggunakan Dana Desa untuk mitigasi, yang merupakan alasan di balik lambatnya tindakan mitigasi. Anggaran pemerintah desa dan daerah tidak cukup untuk melakukan mitigasi bencana banjir. seperti halnya penyediaan Perahu karet yang merupakan salah satu sarana penting dalam mitigasi bencana banjir. Fungsinya mencakup beberapa aspek krusial dalam penanganan situasi darurat akibat banjir. Sebab, dana yang diterima oleh pemerintah nagari Alang Rambah Tapan sangatlah terbatas untuk menjalankan program mitigasi bencana baik struktural maupun non-struktural.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aditiya Setiawan, dkk (2024) juga menunjukkan bahwa masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam mitigasi bencana banjir terkait pelatihan penanggulangan bencana masih kurang serta Pemerintah nagari tidak mempunyai wewenang untuk menyiapkan alat mitigasi bencana. Peralatan penanggulangan bencana masih kurang dari standarisasi peralatan yang semestinya.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal merujuk pada hambatan yang berasal dari faktor luar organisasi. Dilihat dari hasil temuan penelitian didapatkan bahwa dalam menjalankan perannya untuk mitigasi bencana banjir di nagari Alang Rambah Tapan terdapat kendala eksternal yang dihadapi oleh Pemerintah nagari Alang Rambah Tapan yaitu rendahnya kesadaran dari pihak masyarakat setempat akan pentingnya mitigasi bencana banjir yang sering terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Sebab, banjir pasti akan terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi dan dalam kurun waktu yang lama, akan menyebabkan air dari hulu mengalir naik kepemukiman warga.

Meskipun telah dilakukannya sosialisasi kesiapsiagaan untuk mitigasi bencana banjir dari pihak pemerintah nagari, namun kurangnya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki menyebabkan masyarakat lupa serta abai akan bahaya banjir. Bahkan ada sebagian yang beranggapan bahwa selagi bencana banjir belum terjadi lagi maka tidak perlu khawatir berlebihan karena sudah sangat sering terjadi banjir. Serta, kurangnya koordinasi antara pihak

yang terdampak banjir dengan pihak pemerintah daerah dikarenakan terkendala jaringan akibat hujan lebat dan jarak yang jauh sekitar 130 Km dari BPBD Pesisir Selatan menuju daerah bencana banjir nagari Aalang Rambah Tapan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deasy Ariyanto (2018) yang menunjukkan bahwa masih terdapat kendala eksternal yang masih terjadi yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Serta, kurang maksimalnya sosialisasi penanganan/ penanggulangan bencana.

PENUTUP

Hal ini menandakan bahwa pemerintah Nagari Alang Rambah Tapan belum berupaya maksimal dalam mitigasi bencana banjir. Sebab, anggaran dan dana yang ada tidak mencukupi. Selain itu, pemerintah tidak berwenang dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan bencana atau pembuatan pengendalian banjir. Selain itu, kurangnya tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana, Nagari Alang Rambah Tapan juga mengalami buruknya koordinasi antar pemangku kepentingan saat terjadi banjir karena gangguan jaringan dan hambatan akses jarak jauh.

Diharapkan kepada Pemerintah nagari untuk terus berkoordinasi bersama Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat harusnya mempersiapkan anggaran untuk pembuatan pengendalian banjir dengan menggunakan kawat brojong seperti yang telah dilakukan di nagari Binjai Tapan serta normalisasi sungai (perluasan sungai) Batang Tapan di nagari Alang Rambah Tapan agar bencana banjir di nagari Alang Rambah juga segera teratasi. Serta, melakukan pelatihan kebencanaan terkhusus bencana banjir yang dihadiri oleh pakar yang ahli dibidang kebencanaan dan peninjauan kembali daerah rawan bencana untuk segera dilakukan penanganan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Setiawan, A., Rusba, K., Ramdan, M., Saputra, D., & Swandito, A. (2024). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan. *Identifikasi*, 10(1), 42-48.

- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas badan penanggulangan bencana daerah. *Journal of management Review*, 2(1), 161-171.
- Agustin, A. N. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Banjir Di Kota Malang. *Dinamika*, 29(2).
- Bakornas PB. 2007. Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasi di Indonesia. Jakarta: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- Creswell, J. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Research Design*
- Ramli, Soehatman. 2010. Manajemen Bencana. Jakarta: Dialog Rakyat.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yohana, C., Griandini, D., & Muzambeq, S. (2017). Penerapan pembuatan teknik lubang biopori resapan sebagai upaya pengendalian banjir. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 296-308